

ANALISIS PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

NUR'AINI

Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi

Email :

Abstract

The title of this thesis is Analysis of the Proportion of Capital Expenditure to Total Regional Expenditure of Bungo Regency. Advisor Dra. Rahma Nurjanah, M.Sc. The purpose of this research is to know and analyze the development of capital expenditure and regional spending in Bungo in 2006-2012, to know and analyze the proportion of capital expenditure in Bungo Regency in 2006-2012. The analytical method used is a quantitative descriptive method. The results showed that the development of capital spending in Bungo Regency during 2006-2012 was an average of 12.00% per year and the average development of regional spending during 2006-2012 was 13.11% per year. Then the proportion of capital expenditure to total regional expenditure in Bungo Regency in 2006-2012 averaged 26.60% per year.

Keywords: *analysis, capital spending, total regional spending*

Abstrak

Judul skripsi ini adalah Analisis Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Bungo. Pembimbing Dra. Rahma Nurjanah, M.Si. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan belanja modal dan belanja daerah di Bungo tahun 2006-2012, untuk mengetahui dan menganalisis proporsi belanja modal di Kabupaten Bungo tahun 2006-2012. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan belanja modal di Kabupaten Bungo selama tahun 2006-2012 rata-rata sebesar 12.00% pertahun dan rata-rata perkembangan belanja daerah selama tahun 2006-2012 sebesar 13.11% pertahun. Kemudian proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Bungo tahun 2006-2012 rata-rata sebesar 26.60% pertahun.

Kata kunci : analisis, belanja modal, total belanja daerah

PENDAHULUAN

Ketertarikan perekonomian Indonesia pada masa sekarang terhadap tata perekonomian internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Konteks ketertarikan pun berbeda dengan masa colonial walaupun tetap menimbulkan dualisme sosial dan ekonomi. Perbedaannya adalah pada masa sekarang masyarakat pribumi telah memiliki kemerdekaan politik dan system hukum yang demokratis yang memungkinkan mereka untuk menentukan masa depan sejarahnya sendiri. Dengan kata lain, ketertarikan terhadap tata ekonomi internasional yang kapasitas berjalan seiring dengan gelombang demokratisasi yang bertujuan untuk menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai januari 2001. Dalam tahap awal pelaksanaan otonomi daerah, masih ada beberapa daerah yang merasa belum siap, namun sebagian merasa sudah siap melaksanakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan- perubahan baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi.

Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami deficit fiskal.

Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1) pendapatan daerah, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih anatar pendapatan daerah dan belanja daerah. (Mardiasmo, 2004)

Pengeluaran daerah (belanja daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja, yaitu :

- a. Belanja daerah menurut organisasi adalah satu kesatuan penggunaan anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.
- b. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
- c. Bagian belanja misalnya belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan public.
- d. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.
- e. Jenis belanja misalnya belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

Demikian halnya dengan Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Belanja daerah di Kabupaten Bungo terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dibiayai oleh daerah dalam satu tahun anggaran yang telah ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bungo diantaranya terdiri atas belanja modal yang merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

Sebagai gambaran dapat dilihat pada realisasi belanja modal di Kabupaten Bungo selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 realisasi belanja modal di Kabupaten Bungo sebesar Rp.155.673.480.000, Pada tahun 2011 realisasi belanja modal di Kabupaten Bungo sebesar Rp.118.712.915.000, dan terakhir pada tahun 2012 realisasi belanja modal di Kabupaten Bungo sebesar Rp.95.033.758.328.

Apabila dilihat dari data diatas maka terlihat jelas bahwa belanja modal Kabupaten Bungo mengalami fluktuatif, hal tersebut disebabkan oleh belanja modal pemerintah daerah terkadang mengalami penurunan dan terkadang mengalami peningkatan. Belanja modal dianggarkan sesuai dengan kebutuhan daerah pada saat tersebut untuk pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2002:56). Adapun data sekunder ini meliputi buku-buku, brosur atau pamflet atau yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Sumber Data

Adapun sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa literatur laporan tahunan beberapa terbitan seperti statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis belanja daerah pada Kabupaten Bungo dilakukan untuk melihat perkembangan serta kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja daerah. Analisis belanja daerah dilakukan dengan cara belanja daerah tahun sekarang dikurangi belanja daerah tahun lalu dan dibagi dengan belanja daerah tahun lalu kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk melihat perkembangan belanja daerah pada Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2012 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Daerah	Perkembangan %
1	2006	326,360,078,060	
2	2007	429,858,821,000	31.71
3	2008	601,546,286,000	39.94
4	2009	585,080,011,000	-3.00
5	2010	619,036,981,080	5.80
6	2011	669,069,634,000	8.08
7	2012	730,824,219,207	9.23
Rata-rata			13.11

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada belanja daerah Kabupaten Bungo tahun 2007 perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 31.71%, pada tahun 2008 perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 39.94%, pada tahun 2009 perkembangan belanja daerah mengalami penurunan sebesar -3.00%, pada tahun 2010 perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 5.80%, pada tahun 2011 perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 8.08%, dan pada tahun 2012 perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 9.23%. dengan demikian rata-rata perkembangan belanja daerah Kabupaten Bungo tahun 2006-2012 sebesar 13.11% pertahun.

Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2006-2012 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Modal	Perkembangan %
1	2006	77,321,354,460	
2	2007	168,152,375,000	117.47
3	2008	241,003,153,000	43.32

4	2009	160,608,541,000	-33.36
5	2010	155,673,480,000	-3.07
6	2011	118,712,915,000	-23.74
7	2012	95,033,758,328	-19.95
Rata-rata			12.00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo

Berdasarkan tabel 5.2. dapat dilihat bahwa belanja modal Kabupaten Bungo pada tahun 2007 perkembangan belanja modal sebesar 117.47%, pada tahun 2008 perkembangan belanja modal sebesar 43.32%, pada tahun 2009 perkembangan belanja modal menurun menjadi sebesar -33.36%, pada tahun 2010 perkembangan belanja modal meningkat sebesar -3.07%, pada tahun 2011 perkembangan belanja modal sebesar -23.74%, dan pada tahun 2012 perkembangan belanja modal sebesar -19.95%. Sehingga rata-rata persentase perkembangan belanja modal selama tahun 2006-2012 sebesar 12.00% pertahun.

Proporsi belanja modal digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan oleh belanja daerah terhadap belanja modal. Dana yang dialokasikan tersebut digunakan untuk modal pembangunan daerah. Analisis proporsi belanja modal dilakukan dengan cara membandingkan belanja modal dengan total belanja daerah dan dikalikan dengan 100%. Untuk dapat melihat proporsi belanja modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2006-2012

No	Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	% Proporsi
1	2006	77,321,354,460	326,360,078,060	23.69
2	2007	168,152,375,000	429,858,821,000	39.12
3	2008	241,003,153,000	601,546,286,000	40.06
4	2009	160,608,541,000	585,080,011,000	27.45
5	2010	155,673,480,000	619,036,981,080	25.15
6	2011	118,712,915,000	669,069,634,000	17.74
7	2012	95,033,758,328	730,824,219,207	13.00
Rata-rata				26.60

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bungo (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5.3. dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 persentase proporsi sebesar 23.69%, pada tahun 2007 persentase proporsi sebesar 39.12%, pada tahun 2009 persentase proporsi sebesar 40.06%, pada tahun 2010 persentase proporsi sebesar 25.15%, pada tahun 2011 persentase proporsi sebesar 17.74%, dan pada tahun 2012 persentase proporsi sebesar 13.00%. Sehingga rata-rata proporsi belanja modal di Kabupaten Bungo selama tahun 2006-2012 sebesar 26.60% pertahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan belanja modal di Kabupaten Bungo selama tahun 2006-2012 rata-rata sebesar 12.00% pertahun, perkembangan tertinggi terjadi tahun 2007 sebesar 117.47% dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -33.36%.

Perkembangan belanja daerah selama tahun 2006-2012 rata-rata sebesar 13.11% pertahun, perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 31.71% dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar -3.00%.

2. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Bungo selama tahun 2006-2012 rata-rata sebesar 26.60% pertahun, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah sebesar 40.06% dan proporsi terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah sebesar 13.00%.

Saran

Pemerintah daerah harus lebih banyak mengalokasikan belanja modal untuk membiayai infrastruktur dalam rangka menggali potensi daerah

Dalam pengalokasian belanja modal pemerintah harus lebih berhati-hati supaya belanja modal yang dikeluarkan tidak menyimpang dari yang telah dirancang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Novia, 2011. Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- BAPPEDA Tahun 2006-2012 Kabupaten Bungo. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo.
- Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bungo.
- Darise, Nurlan, 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Derise, Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan 1. Edisi Kedua. PT Indeks. Kembangan-Jakarta Barat.
- Halim, Abdul, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2 Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Herawati, 2012. Korelasi Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi Kampus Sarolangun.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul, 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). Vol 1. Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Republik Indonesia.